

STUDI KRITIS PERAN KOMITE SEKOLAH DI MTS NURUL IKHSAN

Hardiansyah

Program Studi Administrasi Pendidikan, FIP IKIP Mataram

Email: theardyst@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa peran komite sekolah dalam (1) Proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) di MTs Nurul Ikhsan Batukliang, (2) Cara memperoleh dukungan dana dan pengalokasian biaya pendidikan di MTs Nurul Ikhsan Batukliang, serta (3) Pengawasan dan evaluasi biaya pendidikan di MTs Nurul Ikhsan Batukliang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja komite sekolah terutama dalam pembiayaan pendidikan di MTs Nurul Ikhsan Batukliang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan) dan mediator (penghubung) telah memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan sekolah tersebut. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai meliputi prasarana fisik dan non fisik. Kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan komite terlihat dari kekompakan dalam penyusunan RAPBS sehingga semua program yang direncanakan mendapat dukungan dana dari pemerintah, wali murid dan pihak swasta.

Kata kunci: Peran, Komite Sekolah, dan Biaya Pendidikan

PENDAHULUAN

Pengembangan sekolah yang berbasis pemberdayaan masyarakat sangatlah relevan dengan USP. Manajemen sekolah konsepnya sudah lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, baik dalam partisipasi formal yang diatur secara hukum maupun partisipasi informal yang bergerak atas dasar keinginan sendiri. Pemberdayaan (*empowerment*) dalam arti kemampuan melakukan sesuatu yang terbaik dalam ukuran sendiri. Masyarakat adalah input dari penggunaan *stakeholders* pendidikan yang akan menikmati langsung hasil dari pendidikan tersebut. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya pada tingkat satuan pendidikan dalam wadah ini berbentuk badan yang diberi nama "Komite Sekolah," atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, perlu dibuat

aturan mengenai struktur organisasi dan kapan Komite Sekolah / Madrasah, Dewan Pendidikan dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak Kontribusi komite sekolah terhadap sekolah.

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:(1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.(2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja

satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.(5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Namun pada kenyataannya di lapangan tidak semua komite sekolah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Keberadaan komite sekolah masih dirasa hanya sebatas menjadi perwakilan dari masyarakat. Berdasarkan pembahasan tentang peran komite sekolah secara umum maka peneliti tertarik ingin mengkaji secara mendalam tentang peran komite sekolah dalam pembiayaan di MTs Nurul Ikhsan Batukliang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif memiliki karakteristik natural, bersifat deskriptif, peneliti lebih memperhatikan proses dari pada hasil atau produk, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih jelas. Setting penelitian di MTs Nurul Ikhsan Batukliang berlangsung di sekolah dengan harapan dapat memperoleh informasi dari kepala sekolah, staf pengajar, staf tata usaha, anggota komite sekolah dan sebagainya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tentang peranan Komite Sekolah dalam pembiayaan pendidikan di MTs Nurul Ikhsan Batukliang. Selain itu, setting penelitian juga berlangsung di lingkungan tempat sekolah berada

terutama di tempat tinggal anggota komite sekolah dengan harapan dapat memperoleh informasi tentang bukti kongkrit peranan komite sekolah MTs Nurul Ikhsan Batukliang dalam hal pembiayaan pendidikan.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu data tentang peranan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Jenis data dalam penelitian ini adalah : (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subyek (informan) yang berkaitan dengan peran komite di MTs Nurul Ikhsan Batukliang. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi selama di lapangan, baik berupa keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Menurut Spradly observasi meliputi tiga komponen yaitu ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas). (Nasution, 1996:63) Pengamatan dilakukan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, ketua komite, dan pengurus selaku penyusun program bersama kepala sekolah, guru kelas sebagai anggota komite, guru kelas sebagai pelaksana program, anggota komite dari unsur wali murid, dan seluruh warga sekolah pada umumnya. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kriteria untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode yang disarankan Moleong (2002), yaitu: (1) derajat kepercayaan (credibility), (2) keteralihan (transferability), (3)

ketergantungan (dependability) dan (4) kepastian (confirmability). Teknik triangulasi adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber data yang berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti dua modus yang dianjurkan Bogdan & Biklen (1982) yaitu proses analisis data dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data, analisis setelah pengumpulan data selesai. Didalam melakukan analisa data peneliti mengacu tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005:91) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, atau biasa dikenal dengan model analisis interaktif. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan seterusnya sampai diperoleh data yang betul-betul mantap sehingga merupakan suatu siklus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Komite Sekolah di MTs Nurul Ikhsan Batukliang memang telah dimulai sejak didirikannya sekolah ini. Bertitik tolak dari visi dan misi serta tujuan yang diharapkan inilah komite dan sekolah mulai menyusun rencana anggaran baik RAPBS maupun rencana anggaran untuk pengembangan sekolah. Kedudukannya sebagai mitra sekolah, dalam pembiayaan pendidikan peran komite terutama pada bagaimana komite memberi masukan pada penyusunan RAPBS. Komite sekolah MTs Nurul Ikhsan Batukliang adalah

pihak yang aktif dalam memberikan masukan-masukan atau ide dalam penyusunan RAPBS. Kegiatan merencanakan sumber dana dan pengeluaran pendidikan dalam anggaran bukan persoalan yang mudah. Darimana sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah serta berapa besarnya harus sudah dapat dihitung sebelumnya. Sumber dana itu mungkin dari bantuan pemerintah pusat / daerah, dari orang tua siswa atau masyarakat, sedangkan komponen-komponen pengeluarannya harus disesuaikan dengan besarnya penerima. Sumber dana terbesar yang diperoleh MTs Nurul Ikhsan Batukliang sampai dengan saat ini adalah dari pemerintah pusat dan daerah. Pihak komite juga beberapa kali mengajak pihak masyarakat sekitar untuk membantu pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Hasil penelitian menunjukkan selain dukungan dana yang diperoleh dari masyarakat dan orang tua siswa, pihak komite juga selalu berusaha untuk memperoleh bantuan dana dari pemerintah.

Proses pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan di MTs Nurul Ikhsan Batukliang, secara administratif diarahkan kepada mekanisme pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan tersebut terlihat dari keterkaitan unit-unit kerja sekolah didalam proses-proses administratif secara teratur dan dalam siklus tertentu dengan maksud memperjelas tentang siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana dan untuk apa hal itu dilakukan. Adapun instrumen pengawasannya terdiri atas pemeriksaan dan pelaporan. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan. Kegiatan ini meliputi sub-sub pemeriksaan terhadap penganggaran, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penggunaan

biaya. Kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah membentuk Tim Penyusun RAPBS, yang ditugasi menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai sesuai dengan kategori program pendidikan yang diselenggarakan atau ditingkatkan pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan seleksi dan identifikasi kebutuhan itu kemudian tim menyusun RAPBS. Pemeriksaan atas pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan, pada umumnya dilakukan oleh Komite Sekolah, Dinas Pendidikan dan aparat pemeriksaan anggaran Kabupaten. Sifat pemeriksaan cenderung ditujukan kepada ketepatan dan keterarahan antara sektor kegiatan yang dibiayai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk itu. Adapun waktu pemeriksaan terdiri atas dua jenis, yaitu pemeriksaan secara insidental dan pemeriksaan berkala setiap triwulan. Ruang lingkup pemeriksaan dapat bersifat menyeluruh, dapat pula terfokus hanya kepada satu atau dua sektor pembiayaan yang dianggap sangat urgen bagi pelaksanaan layanan pengajaran. Pelaporan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara periodik. Arus pelaporan dimulai dari pelaksana belanja dan pelaksana kegiatan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian menyampaikan laporan itu kepada Dinas Pendidikan dan petugas pengelola keuangan daerah Kabupaten. Komite sekolah MTs Nurul Ikhwan Batukliang dalam penyusunan RAPBS selalu aktif memberikan masukan hal ini sesuai dengan peran komite sebagai badan pertimbangan (*Advisory agency*).

Berdasarkan mekanisme penyusunan RAPBS di MTs Nurul Ikhwan Batukliang, Kepala sekolah bersama tim dan komite menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai sesuai dengan kategori program pendidikan yang diselenggarakan atau ditingkatkan pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan seleksi dan

identifikasi kebutuhan itu tim kemudian menyusun RAPBS. Sumber dominan biaya pendidikan di MTs Nurul Ikhwan Batukliang berasal dari anggaran pemerintah. Sebagaimana MTs pada umumnya, MTs Nurul Ikhwan Batukliang mulai melakukan upaya kreatif untuk menggali dan menganekaragamkan sumber perolehan dana pendidikannya.

Hal yang selama ini ditempuh masih terbatas pada penghimpunan dana dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Selain itu pihak komite dan sekolah juga berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat menjadi donatur untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Prosedur dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan mengacu pada ketentuan yang merupakan suatu syarat penting dalam pengendalian mutu keuangan. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik, penerimaan dan pengeluaran dan dapat menimbulkan kesalahan yang tidak segera diperbaiki. Keberhasilan lembaga dalam menyusun RAPBS tahun yang lalu maupun pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana akan diketahui melalui keserangkaian kegiatan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Mengenai evaluasi pendayagunaan biaya pendidikan di MTs Nurul Ikhwan Batukliang secara administratif diarahkan kepada mekanisme pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan tersebut terlihat dari keterkaitan unit-unit kerja lembaga pendidikan di dalam proses-proses administratif secara teratur dan dalam siklus tertentu dengan maksud memperjelas tentang siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana dan untuk apa hal itu dilakukan. Adapun kegiatan pokok evaluasi terdiri atas pemeriksaan dan pelaporan.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Komite sekolah MTs Nurul Ikhsan Batukliang telah menjalankan fungsinya sebagai badan pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penyusunan biaya pendidikan yang tertuang dalam RAPBS, sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala oleh dana karena anggaran telah ditetapkan secara cermat; 2) Komite sekolah sebagai badan pertimbangan selalu mengupayakan penyusunan RAPBS secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi adanya dobel anggaran atau pemborosan biaya pendidikan; 3) Komite sekolah MTs Nurul Ikhsan Batukliang telah mampu menjadi *Supporting Agency* sekaligus sebagai mediator dalam hal penggalangan dana dan alokasi biaya pendidikan, sehingga memperoleh kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengelola biaya pendidikan. Beberapa strategi untuk memperoleh dana senantiasa diupayakan, misalnya dengan penggalangan dana pendamping dari orang tua siswa yang ternyata mampu menjadi nilai tambah dalam pengajuan proposal ke pemerintah; 4) Komite sekolah MTs Nurul Ikhsan Batukliang dalam hal pengawasan dan evaluasi biaya pendidikan telah dapat menjalankan fungsi controlling dengan baik, sehingga dapat memperbaiki manajemen biaya pendidikan di sekolah tersebut. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan komite dalam hal pengawasan dan evaluasi telah dapat memberikan informasi yang positif untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Sebagaimana ditemukan di lapangan, bahwa sumber dominan biaya pendidikan di MTs Nurul Ikhsan Batukliang berasal dari anggaran

pemerintah, oleh karena itu komite dan sekolah harus senantiasa profesional dan transparan dalam pengelolaan biaya pendidikan sehingga dana bantuan dari pemerintah mudah untuk didapatkan. Menjaga hubungan baik dan kerjasama antara sekolah, komite dan masyarakat (orang tua siswa dan pihak swasta), sehingga program-program yang telah direncanakan sekolah mendapat dukungan dana dari masyarakat dan pihak swasta. Serta masih perlu adanya sosialisasi pada masyarakat tentang peranannya dalam komite sekolah. Komite sekolah perlu mencari terobosan-terobosan baru dalam hal penggalangan dana dari pihak swasta, sehingga peran swasta lebih ditingkatkan, misalnya melalui kerjasama dalam penjualan produk oleh para siswa, maka dari perusahaan dapat keuntungan dari penjualan produk dan dari pihak sekolah para siswanya memperoleh ilmu tentang pemasaran suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2006. *Strategic Managemen for Educational Management*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyono. 2008. *Pengertian Komite* <http://kriptk.blogspot.com/arcive/2009/01/26> di akses tanggal 28 Juli 2013
- Riyanto, Y. 2001. *Metodologi Penelitian*. SIC: Surabaya.
- Sugiyono. 2007 (a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011 (b). *Statistika Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi, A. 2013 (a). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulistiani. 2003. *Kinerja Komite*. Bina Aksara. Jakarta.